



MENIMBANG TEORI-TEORI SOSIAL POSTMODERN: SEJARAH, PEMIKIRAN, KRITIK DAN MASA DEPAN POSTMODERNISME

Medhy Aginta Hidayat

Program Studi Sosiologi, FISIB, Universitas Trunojoyo, Madura

Email: medhy.hidayat@trunojoyo.ac.id

Abstrak

Artikel ini memaparkan latar belakang sejarah lahirnya teori-teori sosial postmodern, konsep-konsep pemikiran tokoh-tokoh teori sosial postmodern, serta kritik dan prospek masa depan teori-teori sosial postmodern. Harus diakui, teori-teori sosial postmodern dewasa ini cenderung berada dalam ketegangan pendapat antara kubu yang memandang bahwa teori-teori sosial postmodern masih menjadi bagian dari era modern dan kubu yang meyakini bahwa teori-teori ini telah terpisah sama sekali dari era modern. Kedua pandangan di atas, dengan landasan argumentasi masing-masing, akan dicoba dilacak di dalam artikel ini. Dengan memanfaatkan metode kajian kepustakaan (*literature studies*), artikel ini pada akhirnya hendak memberikan gambaran kritis tentang posisi penting teori-teori sosial postmodern dalam kajian sosiologi kontemporer dewasa ini, serta potensi kemungkinan-kemungkinan perkembangannya di masa depan.

Kata Kunci : *postmodernisme, postmodern, teori-teori sosial, teori sosiologi*

Abstract

This article explains the historical background of postmodern social theory, the concepts of postmodern social theory from its prominent figures, also critics and future prospect of postmodern social theory. It must be admitted, the recent postmodern social theory tend to be in conflict between party who sees postmodern social theory is a part of modern era and party who believes that these theory has been separated from modern era. Those two opinions, with their own argumentative cornerstone, will be tracking down in this article. Using literature studies method, this article will give critical insight about the importance of postmodern social theory in recent contemporary sociological studies and its potential development in the future.

Keywords : *postmodernism, postmodern, social theory, sociological theory*



PENGANTAR

Tidak berlebihan kiranya jika dinyatakan bahwa istilah postmodernisme dan berbagai istilah turunannya (*postmodern*, *postmodernitas*, *postmodernisasi*) telah menjadi “buzz word” penting dalam kehidupan sosial dan budaya kita dewasa ini. Paradigma pemikiran yang populer dengan sebutan peyoratif “posmo” ini kini nyaris hadir di setiap denyut kehidupan. Seni posmo, sastra posmo, film posmo, arsitektur posmo, ideologi posmo, budaya posmo, dan bahkan teologi posmo adalah beberapa contoh maraknya kehadiran ide “postmodernisme” dalam berbagai sisi kehidupan kontemporer.

Sayangnya, penggunaan istilah postmodernisme seringkali salah kaprah dan cenderung menyesatkan. Postmodernisme kerap kali diidentikkan dengan sikap-sikap negatif seperti “asal beda”, “semau gue”, “bukan ini dan bukan itu”, “nyentrik” dan bahkan tidak jarang dipahami sebagai “klenik”. Padahal, jika dilacak sejarah filosofis dan sosiologisnya, postmodernisme memiliki akar historis dan akademis yang kuat. Setidaknya, postmodernisme perlu diletakkan secara proporsional dalam tataran arus pemikiran filsafat dan teori sosial terkini dengan merujuk pada pemikiran tokoh-tokoh teori sosial postmodern.

Selain dalam kehidupan sehari-hari, postmodernisme, dengan berbagai wajah dan karakternya, juga telah merasuk nyaris di semua bidang kajian ilmu sosial dan budaya: seni, sastra, bahasa, ekonomi, politik, komunikasi, antropologi, administrasi, dan tentu saja sosiologi. Berbagai teori berbasis pemikiran postmodernisme pun lahir. Dalam wilayah sosiologi, kajian tentang postmodernisme baru menemukan bentuk dan kematangannya pada rentang waktu antara tahun 1960 hingga 1980-an. Sejumlah teori sosial postmodern pun lahir dan berkembang dari tokoh-tokoh pemikir postmodern pada kisaran waktu tersebut.

Beberapa tokoh pemikir teori sosial postmodern di antaranya adalah Jean Francois Lyotard, Michel Foucault, Jacques Derrida, Jean Baudrillard, dan Friedrich Jameson. Meskipun masih terus berkembang hingga saat ini, harus diakui bahwa puncak perkembangan pemikiran teori sosial postmodern terjadi pada era tahun 1980-an. Artikel ini mencoba memaparkan secara ringkas pengertian, sejarah pemikiran, konteks sosial serta konsep-konsep kunci teori sosial postmodern seperti yang diuraikan oleh sejumlah tokoh postmodernisme sejak akhir tahun 1960-an.

POSTMODERN:

AKAR DAN TURUNAN ISTILAH

Istilah postmodern secara harfiah berarti “setelah modern”. Istilah “modern”, yang berarti zaman baru, berasal dari bahasa Latin *modernus*, yang telah digunakan sejak abad ke-5 M untuk menunjuk batas antara era kekuasaan agama Kristen dan era Paganisme Romawi (Smart, 1990). Istilah ini kemudian berkembang menjadi beberapa istilah turunan yang kesemuanya menunjuk pada suatu kurun sejarah setelah era Abad Pertengahan. Beberapa istilah tersebut adalah *modernitas*, *modernisasi* dan *modernisme*. Dalam penggunaannya, seringkali terjadi tumpang tindih dan simplifikasi pengertian di antara berbagai istilah ini. Meskipun demikian, diterima suatu kenyataan bahwa yang diacu oleh istilah-istilah ini adalah suatu era kebudayaan baru yang ditegakkan oleh *rasio*, *subjek* dan wacana *antropomorfisme*.

Sementara itu istilah *modernitas* (*modernity*) diartikan sebagai kondisi sosial budaya masyarakat modern. Istilah ini sekaligus menggambarkan hubungan antara masa kini dan masa silam, serta sebagai kurun sejarah yang berbeda dimana *modernitas* lebih superior



dibanding masa sebelumnya. Modernitas inilah, merujuk Calinescu, yang merupakan era yang lebih dewasa, lebih utuh dan mendasar dalam aspek-aspek rasio, religi dan estetika dibanding era sebelumnya (Smart, 1990). Modernitas sekaligus juga menjadi titik awal baru lantaran ia menawarkan hal-hal baru seperti: pengetahuan, moral, ilmu, kebudayaan, politik dan seni.

Modernisasi (modernization) berarti proses berlangsungnya proyek mencapai kondisi modernitas. Modernisasi mencakup proses pengucilan karya-karya klasik, warisan masa lampau dan sejarah purbakala, karena modernitas pada hakekatnya mengambil posisi yang berlawanan dengan hal-hal lama demi terciptanya hal-hal baru. Dengan demikian, modernisasi adalah pandangan dan sikap hidup yang dianut untuk menghadapi masa kini, yakni pandangan dan sikap hidup dalam menghadapi kenyataan hidup masa kini.

Modernisasi ditandai oleh pemutusan hubungan secara tegas terhadap nilai-nilai tradisional; berkembangnya sistem ekonomi kapitalisme progresif; rasionalisasi administratif; serta diferensiasi sosial dan budaya (Featherstone, 1988). Kembali merujuk Berman, realitas modern yang dicapai melalui proses modernisasi ini memiliki beberapa komponen utama, yakni industrialisasi, urbanisasi, konsep negara-bangsa (nation-state), struktur birokrasi, pertumbuhan penduduk yang tinggi, sistem komunikasi dan kekuasaan baru, serta pasar kapitalisme dunia (Turner, 1990).

Jika merujuk makna kamus, *Oxford English Dictionary* mendefinisikan terma postmodernisme sebagai "suatu gaya dan konsep dalam seni yang dicirikan oleh sikap ketidakpercayaan terhadap teori dan ideologi." Dalam kamus *Merriam-Webster Dictionary*, postmodern didefinisikan sebagai "yang berhubungan dengan atau sebuah era setelah era modern " atau "yang berhubungan dengan

atau salah satu dari berbagai gerakan sebagai reaksi terhadap modernisme yang dicirikan oleh sikap kembali ke bentuk dan bahan tradisional (dalam arsitektur) atau oleh sikap referensi-diri yang ironis dan absurd (dalam sastra)", atau juga "yang berhubungan dengan atau suatu teori yang melibatkan penolakan radikal atas asumsi-asumsi modern mengenai kebudayaan, identitas, sejarah dan bahasa".

Sementara itu, *American Heritage Dictionary* menjelaskan istilah yang sama sebagai "sesuatu yang berhubungan dengan seni, arsitektur, atau sastra yang bereaksi menolak prinsip-prinsip modernisme, dengan cara memperkenalkan kembali unsur-unsur gaya tradisional atau klasik atau dengan cara membawakan gaya atau praktik modernisme secara ekstrim".

Postmodernisme awalnya memang merupakan reaksi terhadap modernisme. Postmodernisme merujuk pada bentuk-bentuk kebudayaan, intelektual, dan seni yang telah kehilangan hirarki atau prinsip kesatuan serta disarati kompleksitas ekstrim, kontradiksi, ambiguitas, perbedaan, dan kesalingtautan sehingga sulit dibedakan dengan parodi.

Sementara itu, terma postmodernitas adalah istilah turunan postmodernisme yang merujuk pada aspek-aspek non-seni sejarah yang dipengaruhi oleh berbagai gerakan baru, terutama perkembangan dalam dunia sosial, ekonomi dan kebudayaan sejak tahun 1960-an. Ketika pemikiran tentang penolakan terhadap modernisme diadopsi oleh ranah teori yang lain, dalam beberapa hal ia menjadi sama dengan postmodernitas. Istilah postmodernitas sendiri juga sering dikaitkan dengan poststrukturalisme (ala Michel Foucault) dan dengan modernisme, dalam pengertian penolakan terhadap budaya borjuis elit.

Istilah postmodern pertama kali dipergunakan sekitar tahun 1870-an dalam berbagai bidang. Sebagai contoh, John Watkins Chapman menyuarakan



"lukisan gaya postmodern" yang berbeda dengan Impressionisme Perancis. Selanjutnya J.M. Thompson, dalam sebuah artikelnya di tahun 1914 di jurnal *The Hibbert Journal*, menggunakannya untuk menggambarkan perubahan sikap dan kepercayaan dalam wilayah kritik agama (Smart, 1990).

Pada tahun 1917 Rudolf Pannwitz menggunakan istilah postmodern untuk menjelaskan sebuah kebudayaan yang berorientasi filsafat. Gagasan Pannwitz tentang postmodernisme datang dari analisis Nietzsche tentang modernitas dan sejarahnya yang berakhir pada dekadensi dan nihilisme (Turner, 1990). Istilah postmodernisme selanjutnya digunakan pada tahun 1926 oleh B.I. Bell dalam artikelnya "*Postmodernism and Other Essays*." Pada tahun 1925 dan 1921 istilah itu digunakan untuk menjelaskan bentuk baru seni dan musik. Tahun 1942 H. R. Hays menggunakannya untuk merujuk sebuat karya sastra baru. Tahun 1939, Arnold J. Toynbee, seorang sejarawan terkemuka pada zamannya menggunakan istilah postmodernisme untuk menjelaskan sebuah sejarah pemikiran (Turner, 1990).

Istilah postmodern selanjutnya digunakan untuk menggambarkan seluruh gerakan, terutama dalam seni, musik dan sastra yang menentang modernisme dan secara tipikal ditandai dengan dilahirkannya kembali unsur-unsur dan teknik-teknik tradisional. Pemikiran teoritis postmodern dalam filsafat dan analisis kebudayaan serta masyarakat telah memperluas arti penting teori ini dan menjadi titik berangkat berbagai gerakan untuk mengevaluasi sistem nilai Barat yang berlangsung sejak tahun 1960-an.

Munculnya teori sosial postmodern selanjutnya telah mendorong perkembangan ilmu-ilmu sosial kontemporer dewasa ini. Di satu sisi, munculnya teori sosial postmodern patut diapresiasi. Merujuk Pauline M. Rosenau (1992), kemunculan teori-teori sosial postmodern ini telah mendorong lahirnya

kesadaran kritis dan reflektif terhadap paradigma modernisme yang dianggap banyak melahirkan patologi modernitas. Setidaknya terdapat enam patologi modernitas yang digugat oleh para pemikir postmodern.

Pertama, lantaran pandangan dualistiknya yang membagi seluruh kenyataan menjadi subjek-objek, spiritual-material, manusia-dunia, dan lain-lain, paham modernisme telah melakukan tindakan objektivasi alam secara berlebihan dan eksploitasi alam secara semena-mena. **Kedua**, pandangan modern yang cenderung objektivistik dan instrumental-positivistik akhirnya jatuh pada pembendaan (*reifikasi*) manusia dan masyarakat. Sebagai akibatnya modernisme yang dahulu emansipatif kini justru bersifat *dehuman*. **Ketiga**, dominasi ilmu-ilmu empiris-positivistik terhadap nilai moral dan religi menyebabkan meningkatnya tindak kriminalitas, kekerasan fisik maupun kesadaran keterasingan dan pelbagai bentuk depresi mental.

Keempat, merebaknya pandangan materialisme, yakni prinsip hidup yang memandang materi dan segala strategi pemuasannya sebagai satu-satunya tujuan. **Kelima**, berkembangnya militerisme karena moral dan agama tidak lagi memiliki kekuatan disiplin dan regulasi. **Keenam**, bangkitnya kembali tribalisme, semangat rasisme dan diskriminasi, yang merupakan konsekuensi logis hukum *survival of the fittest* ala Charles Darwin (Sugiharto, 1996).

Di sisi lain, kesemaran yang menyertai perkembangan teori sosial postmodern telah pula melahirkan euforia berlebihan yang menganggap paham postmodernisme akan mengubur paham modernisme dan menjadi satu-satunya pandangan dunia yang benar. Sikap demikian tentu saja bertolak belakang dengan keyakinan postmodernisme yang justru menolak segala bentuk narasi besar (*grand narratives*) dan absolutisme kebenaran.



KRISIS ERA MODERN DAN LAHIRNYA TEORI-TEORI SOSIAL POSTMODERN

Jejak-jejak pemikiran yang bernaung di bawah payung postmodernisme – seni, sastra, politik, ekonomi, arsitektur, sosiologi, antropologi dan filsafat – sebenarnya dapat dilacak jauh ke alur sejarah modernitas. Secara historis, modernisme bisa ditelusuri semenjak era Renaisans abad ke-16 M. Bahkan Arnold Toynbee, seorang filsuf sejarawan, melalui bukunya *A Study of History* (1947), menyatakan bahwa awal Era Modern dalam sejarah masyarakat Barat terjadi pada paruh kedua abad ke-15 M, dimana saat itu muncul fenomena teknologi penguasaan samudera secara ekstensif (Smart, 1990). Fenomena ini, menurut Toynbee, merupakan titik awal kedewasaan dan kematangan manusia untuk mulai berani menguasai alam dan melepaskan diri dari dogma-dogma institusi agama. Dengan keberanian inilah manusia telah memasuki era baru, era pasca Abad Pertengahan, yakni era modern.

Di sisi lain, Marshall Berman, dalam kajiannya tentang modernisme, menyatakan bahwa era modern telah dimulai sejak era Renaisans abad ke-16 M dan berkembang dalam tiga fase sejarah modernisme.

Fase pertama, adalah modernisme yang berkembang semenjak awal abad ke-16 M hingga akhir abad ke-18 M, dimana orang baru mulai merasakan pengalaman kehidupan modern. Modernisme pada tahap ini ditandai oleh mulai diyakininya rasio, keberanian menghadapi kehidupan secara nyata, memudarnya religiusitas dalam berbagai segi kehidupan, serta lahirnya pemberontakan kreatif dalam dunia seni.

Fase kedua, adalah modernisme yang ditandai dengan Revolusi Perancis dan kekacauan sosial, politik dan ekonomi yang seringkali dihubungkan dengan momentum Gelombang Revolusi Besar 1790. Inilah wajah modernisme yang mulai

diwarnai oleh benih-benih konflik, perbedaan dan anomali. Lenturnya ikatan sosial, runtuhnya keyakinan tradisional dan agama, serta pesatnya perkembangan sosial, telah mendorong munculnya berbagai masalah yang sebelumnya tidak diperhitungkan.

Fase ketiga, adalah modernisme yang dimulai ketika terjadi proses modernisasi global dan pembentukan kebudayaan dunia modern secara massal dimana semakin banyak terjadi kekacauan sosial dan politik, ketidakpastian dan ancaman terhadap realitas dunia yang baru terbentuk. Inilah puncak anomali realitas modern, yang ternyata tidak mampu mewujudkan impian menciptakan kehidupan yang lebih baik. Dan justru sebaliknya, menciptakan berbagai masalah besar yang menyengsarakan umat manusia (Smart, 1990: 16).

Sementara itu *modernisme (modernism)* umumnya dilihat sebagai paradigma kebudayaan, khususnya aliran seni dan sastra. Ia mengacu pada gaya dan gerakan seni yang mula-mula muncul sebagai konsekuensi perlawanan terhadap seni Abad Pertengahan. Tokoh-tokoh seni yang dianggap mewakili gerakan modernisme misalnya adalah Kafka, Mann, dan Gide dalam dunia sastra; Stravinsky, Schoenberg dan Berg dalam musik; Strindberg, Pirandello dan Wedehind dalam drama; serta Picasso, Matisse dan Cezanne dalam seni lukis (Featherstone, 1988). Dalam konteks ini, modernisme dianggap bermula pada akhir abad ke-19 M (Lash, 1990). Modernisme merupakan keyakinan yang cenderung mensubordinasikan yang tradisional di bawah yang baru.

Dalam wilayah seni, ia merupakan tindak diferensiasi terhadap dunia nyata yang bersifat non-referensial dan anti-realis (Lash, 1990). Akibat praksis tindakan ini bisa terbagi dua: konservatif dan radikal. Modernisme menjadi konservatif manakala proses subordinasi yang lama di bawah yang baru justru menyelamatkan yang lama dari kehancuran. Sebaliknya, modernisme menjadi



radikal manakala proses subordinasi tadi mengambil bentuk pengingkaran bahkan penghapusan yang tradisional. Modernisme konservatif seringkali terdapat dalam lapangan agama. Sementara modernisme radikal banyak terdapat pada wilayah kebudayaan, terutama seni.

Rasionalitas modernisme memiliki dua karakter mendasar. **Pertama**, sebagai rasionalitas tujuan (*Zweckrationalitat*). **Kedua**, sebagai rasionalitas nilai (*Wertrationalitat*). Merujuk Max Weber, sosiolog Jerman yang mengkaji modernisme secara mendalam, karakter pertama rasionalitas modernisme mengacu pada pengertian perhitungan yang masuk akal untuk mencapai sasaran berdasarkan pilihan-pilihan yang masuk akal dan dengan sarana-sarana yang efisien serta mengacu pada perumusan nilai-nilai tertinggi yang mengarahkan tindakan dan orientasi-orientasi yang terencana secara konsisten dari pencapaian nilai-nilai tersebut.

Rasionalitas ini berwatak formal, karena hanya mementingkan cara-cara mencapai tujuan dan tidak mengindahkan nilai-nilai yang dihayati sebagai intisari kesadaran. Karakter kedua rasionalitas modernisme mengacu pada kesadaran akan nilai-nilai etis, estetis dan religius. Rasionalitas ini berwatak substantif, karena lebih mementingkan komitmen rasional terhadap nilai-nilai yang dihayati secara pribadi. Namun, di antara kedua bentuk rasionalitas ini yang sangat dominan dalam realitas dunia modern adalah rasionalitas tujuan.

Dalam kajian pentingnya tentang modernisme tersebut, selanjutnya Weber menyatakan bahwa pada dasarnya modernitas adalah gagasan yang menyangkut persoalan pemisahan bidang-bidang nilai dan tatanan kehidupan. Ia berpendapat bahwa wilayah-wilayah nilai ekonomi, etika, hukum dan estetika, yang sebelumnya terstruktur dengan satu prinsip kesatuan dalam wilayah religius Abad Pertengahan, kemudian mulai dipisahkan oleh rasionalisme Pencerahan. Landasan utama argumen

Weber ini adalah adanya fenomena otonomisasi wilayah-wilayah nilai terutama wilayah nilai estetis. Dengan merosotnya agama, lapangan estetika seolah menjadi satu-satunya tempat pelarian dalam dunia yang sarat beban mencapai rasionalitas tujuan (Lash, 1990).

Menurut Weber, modernitas merupakan konsekuensi proses modernisasi, dimana realitas sosial berada di bawah bayang-bayang dan dominasi asketisme, sekularisasi, klaim universalistik tentang rasionalitas instrumental, diferensiasi bidang-bidang kehidupan, birokratisasi ekonomi, praktek-praktek politik dan militer, serta tumbuhnya moneterisasi nilai-nilai.

Modernitas lahir bersamaan dengan menyebarnya imperialisme Barat abad ke-16 M; dominasi kapitalisme Eropa Utara, khususnya di Inggris dan Belanda; pengakuan dan penerapan metode ilmiah Francis Bacon dan Isac Newton; institusionalisasi keyakinan dan praktek-praktek Calvinisme di Eropa Utara; pemisahan konsep keluarga dari kelompok kekerabatan yang umum; serta pembentukan konsep negara-bangsa (*nation-state*) abad ke-19 M (Turner, 1990). Modernitas juga menunjuk pada perubahan sosial budaya secara massif, pemutusan hubungan secara radikal terhadap tradisi dan kemapanan sosial peradaban yang mandeg. Dengan kata lain, modernitas adalah sejarah penaklukan nilai-nilai lama Abad Pertengahan oleh nilai-nilai baru Modernisme (Turner, 1990).

Secara epistemologis, modernitas meliputi empat unsur pokok. **Pertama**, subjektivitas reflektif, yakni pengakuan akan kekuatan-kekuatan rasional dalam memecahkan masalah-masalah kehidupan. **Kedua**, subjektivitas yang berkaitan dengan kritik atau refleksi, yakni kemampuan untuk menyingkirkan kendala-kendala kebebasan dari tradisi dan sejarah. **Ketiga**, kesadaran historis yang dimunculkan oleh subjek, bahwa waktu berlangsung secara linear, unik, tak terulangi



dengan titik berat pada kekinian sebagai sumber sejarah. Oleh sebab itu, modernisme memiliki kata-kata kunci: revolusi, evolusi, transformasi serta progresi. Dengan kata lain, modernitas mendukung rasio (di atas wahyu), kemajuan (di atas kemapanan) dan kebaruan (di atas kelampauan).

Keempat, universalisme yang mendasari ketiga unsur sebelumnya. Dengan universalisme dimaksudkan bahwa elemen-elemen modernitas bersifat normatif untuk masyarakat yang akan melangsungkan modernisasi. Dengan modernisasi, kebenaran wahyu diuji di hadapan rasio, legitimasi kekuasaan digugat melalui kritik dan kesahihan tradisi dipertanyakan berdasarkan harapan akan masa depan yang lebih baik.

Dengan kata lain, semenjak suatu masyarakat menyatakan diri melaksanakan proses modernisasi, maka masyarakat tersebut harus siap meninggalkan sikap-sikap naif, dogmatis dan anti-perubahan, untuk kemudian meleburkan diri dalam suatu proyek sejarah umat manusia mencapai tujuan tertentu di masa depan. Modernisme yang rasional, ketat, serius, sistematis dan tertib inilah wacana dominan yang mengisi sejarah modernitas hingga sekarang. Semangat emansipasi, optimisme dan heroisme menghadapi situasi zaman seolah merupakan satu-satunya tanggapan terhadap proyek sejarah modernisme.

Padahal, sebagaimana diungkap Michel Foucault, pada waktu itu terdapat pula tanggapan menyimpang terutama dari kalangan seniman yang bernada ironi terhadap modernisme. Terdapat pula pelbagai nilai, keyakinan, realitas dan praktek-praktek sosial yang ternyata menyimpang dari rasionalitas era modern. Suara-suara minoritas modernisme: subkultur, hippies, punk, skin head, masyarakat terasing, dunia ketiga, kaum gay, gerakan lingkungan hidup, kaum feminis, budaya tanding mulai menggugat pandangan modernisme yang dianggap gagal merampungkan proyek heroisme Pencerahan untuk membangun sebuah masa depan

yang lebih baik. Membaca modernisme dengan sikap ironi ini berarti menolak anggapan bahwa modernitas membawa nilai-nilai universal (Sahal, 1994).

Pauline M. Rosenau, dalam kajiannya mengenai postmodernisme dan ilmu-ilmu sosial, mencatat setidaknya lima alasan penting terjadinya krisis modernisme (Rosenau, 1992). **Pertama**, modernisme dipandang gagal mewujudkan perbaikan-perbaikan ke arah masa depan kehidupan yang lebih baik sebagaimana diharapkan oleh para pendukungnya. **Kedua**, ilmu pengetahuan modern tidak mampu melepaskan diri dari kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan otoritas keilmuan demi kepentingan kekuasaan.

Ketiga, terdapat banyak kontradiksi antara teori dan fakta dalam perkembangan ilmu-ilmu modern. **Keempat**, ada semacam keyakinan bahwa ilmu pengetahuan modern mampu memecahkan segala persoalan yang dihadapi manusia. Namun ternyata keyakinan ini keliru dengan munculnya berbagai patologi sosial. **Kelima**, ilmu-ilmu modern kurang memperhatikan dimensi-dimensi mistis dan metafisis manusia karena terlalu menekankan atribut fisik individu.

Krisis modernitas inilah yang selanjutnya mendorong lahirnya gerakan dan pandangan post-modernisme di berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam wilayah teori-teori ilmu-ilmu sosial kontemporer dewasa ini.

POSTMODERNISME DAN KONDISI MASYARAKAT POSTMODERN

Semenjak awal paruh kedua abad ke-20 M, tepatnya pada kisaran tahun 1960-an, post-modernisme telah muncul sebagai diskursus kebudayaan yang banyak menarik perhatian. Berbagai bidang kehidupan dan disiplin ilmu seperti: seni, arsitektur, sastra, sosiologi, sejarah, antropologi, politik dan filsafat hampir secara



bersamaan memberikan tanggapan terhadap tema postmodernisme.

Istilah postmodernisme, merujuk Ihab Hassan, dipergunakan pertama kali dalam dunia intelektual oleh Federico de Onis, seorang kritikus seni, pada tahun 1930 dalam tulisannya *Antologia de la Poesia Espanola a Hispanoamericana* untuk menunjuk kepada reaksi minor terhadap era modernitas saat itu (Featherstone, 1988). Istilah ini kemudian sangat populer di tahun 1960-an ketika seniman-seniman muda, penulis dan kritikus seni seperti Hassan, Rauschenberg, Cage, Bartheleme, Fielder dan Sontag menggunakannya sebagai nama gerakan penolakan terhadap seni modernisme lanjut.

Seni postmodern memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan seni modernisme lanjut. Beberapa ciri seni postmodern diantaranya adalah hilangnya batas antara seni dan kehidupan sehari-hari, runtuhnya distingsi antara budaya tinggi dan budaya massa/populer, maraknya gaya eklektis dan campur aduk, munculnya *kitsch*, parodi, *pastiche*, *camp* dan ironi, merosotnya kedudukan pencipta seni, serta adanya asumsi seni sebagai pengulangan, *perpetual art* (Featherstone, 1988).

Penggunaan istilah postmodernisme dan berbagai turunannya selanjutnya perlahan-lahan mulai menyentuh bidang-bidang yang lain. Dalam bidang arsitektur, istilah postmodernisme mengacu kepada perlawanan bentuk-bentuk arsitektur modern. Arsitektur modern dikenali dari ciri-cirinya yang menonjolkan keteraturan, rasionalitas, objektif, praktis, ruang isotropis dan estetika mesin, dimana prinsip bentuk mengikuti fungsi menjadi dewa. Arsitektur postmodernisme, sebaliknya, menawarkan konsep bentuk asimetris, ambigu, naratif, simbolik, terpiuh, penuh kejutan dan variasi, ekuivokal, penuh ornamen, metafor serta akrab dengan alam (Siswanto, 1994). Doktrin bentuk mengikuti fungsi dibalik menjadi fungsi mengikuti bentuk.

Jika modernitas dipahami sebagai kurun waktu sejarah yang berkembang semenjak era Renaisans, maka postmodernitas adalah kurun waktu sejarah yang seringkali dikaitkan dengan perubahan realitas dunia seusai Perang Dunia II (Featherstone, 1988). Postmodernitas ditandai dengan lahirnya totalitas struktur sosial baru, perkembangan teknologi dan informasi yang pesat, serta terbentuknya masyarakat komputerisasi, dunia simulasi dan hiperrealitas.

Merujuk Mike Featherstone, seorang sosiolog dan kritikus kebudayaan, postmodernisme memiliki tiga ruang pengertian yang berada dalam wilayah kebudayaan. **Pertama**, sebagai perubahan bentuk teorisasi, presentasi dan diseminasi karya seni dan intelektual yang tidak dapat dipisahkan dari perubahan mikro dalam wilayah kebudayaan. **Kedua**, sebagai perubahan ruang budaya yang lebih luas mencakup bentuk-bentuk produksi, konsumsi dan sirkulasi tanda dan simbol yang dapat dikaitkan dengan perubahan yang lebih luas pula dalam relasi keseimbangan dan kekuasaan dalam masyarakat. **Ketiga**, sebagai perubahan praktek dan pengalaman keseharian berbagai kelompok yang menggunakan rezim penandaan (*regime of signification*) dalam berbagai cara dan gaya, serta mengembangkan sarana-sarana baru bagi orientasi dan pembentukan identitas (Featherstone, 1988).

Sementara itu, Daniel Bell, seorang sosiolog, bahkan melihat postmodernisme sebagai puncak tendensi perlawanan terhadap modernisme, dengan hasrat, insting dan kegairahan untuk membawa logika modernisme sampai ke titik terjauh yang mungkin bisa dicapai (Featherstone, 1988). Agak berbeda dengan Bell, Jean Baudrillard, salah seorang pembicara terdepan postmodernisme, memandang postmodernisme lebih sebagai strategi pembacaan realitas dengan objek sentral prinsip reproduksi tanda-tanda, kapitalisme multinasional yang membawa akibat perluasan luar biasa dalam



dunia sosial dan meledaknya budaya massa.

Postmodernisme dengan demikian adalah metode analisa kritis yang mencoba membongkar mitos dan anomali paradigma modernisme, membuka ironi, intertekstualitas dan paradoks, mencoba menemukan suatu teori masyarakat postmodern atau postmodernitas, dan menggambarannya dalam realitas sosial yang ada dalam masyarakat kontemporer Barat dewasa ini (Featherstone, 1988).

Merujuk Akbar S. Ahmed, dalam bukunya *Postmodernism and Islam* (1992), terdapat delapan ciri karakter sosiologis postmodernisme. **Pertama**, timbulnya pemberontakan secara kritis terhadap proyek modernitas, memudarnya kepercayaan pada agama yang bersifat transenden dan semakin diterimanya pandangan pluralisme-relativisme kebenaran. **Kedua**, meledaknya industri media massa, sehingga ia seolah merupakan perpanjangan dari system indera, organ dan syaraf manusia. Kondisi ini pada gilirannya menjadikan dunia dan ruang realitas kehidupan terasa menyempit. Lebih dari itu, kekuatan media massa telah menjelma menjadi Agama dan Tuhan baru yang menentukan kebenaran dan kesalahan perilaku manusia.

Ketiga, munculnya radikalisme etnis dan keagamaan. Fenomena ini muncul sebagai reaksi manakala orang semakin meragukan kebenaran ilmu, teknologi dan filsafat modern yang dinilai gagal memenuhi janji emansipatoris untuk membebaskan manusia dan menciptakan kehidupan yang lebih baik. **Keempat**, munculnya kecenderungan baru untuk menemukan identitas dan apresiasi serta keterikatan romantisme dengan masa lampau. **Kelima**, semakin menguatnya wilayah perkotaan (*urban area*) sebagai pusat kebudayaan dan sebaliknya, wilayah pedesaan (*rural area*) sebagai daerah pinggiran. Pola ini juga berlaku bagi menguatnya dominasi negara maju (Negara Dunia Pertama) atas negara berkembang (Negara Dunia Ketiga).

Keenam, semakin terbukanya peluang bagi pelbagai kelas sosial atau kelompok minoritas untuk mengemukakan pendapat secara lebih bebas dan terbuka. Dengan kata lain, era postmodernisme telah turut mendorong proses demokratisasi.

Ketujuh, munculnya kecenderungan bagi tumbuhnya ekletisisme dan pencampuradukan berbagai diskursus, nilai, keyakinan dan potret serpihan realitas, sehingga sekarang sulit untuk menempatkan suatu objek budaya secara ketat pada kelompok budaya tertentu secara eksklusif.

Kedelapan, bahasa yang digunakan dalam diskursus postmodernisme seringkali mengesankan tidak lagi memiliki kejelasan makna dan konsistensi, sehingga bersifat paradoks (Ahmed, 1992).

Pauline M. Rosenau, dalam bukunya *Postmodernism and Social Sciences* (1992), selanjutnya membedakan postmodernisme menjadi dua bentuk. **Pertama**, postmodernisme sebagai paradigma pemikiran. Sebagai paradigma pemikiran, postmodernisme meliputi tiga aspek ontologi, epistemologi dan aksiologi. Ketiga aspek dasar ini menjadi kerangka berpikir dan bertindak penganut postmodernisme bentuk pertama (misalnya Lyotard, Derrida, Foucault). **Kedua**, postmodernisme sebagai metode analisis kebudayaan. Dalam konteks ini, prinsip dan pemikiran postmodernisme digunakan sebagai lensa membaca realitas sosial budaya masyarakat kontemporer (misalnya Rorty dan Baudrillard).

Sementara itu, sejumlah kalangan memandang postmodernisme sebagai bagian dari proyek modernisme yang belum usai (misalnya Juergen Habermas dan Mahzab Frankfurt generasi kedua), namun sejumlah kalangan yang lain memandang postmodernisme sebagai penolakan radikal terhadap nilai-nilai dan asumsi-asumsi modernisme (misalnya Lyotard, Derrida, Foucault). Postmodernisme juga sering dirujuk pada berbagai fenomena realitas masyarakat kontemporer dewasa ini sebagai masyarakat post-industri



(*post-industrial society*), masyarakat komputer (*computerized society*), masyarakat konsumen (*consumer society*), masyarakat media (*media society*), masyarakat tontonan (*spectacle society*) atau masyarakat tanda (*semiurgy society*).

TOKOH-TOKOH TEORI SOSIAL POSTMODERN

1. Jean Francois Lyotard: Narasi Besar dan Masyarakat Komputerisasi

Jean François Lyotard lahir di Versailles, Perancis pada tahun 1924. Karir akademiknya diawali sebagai guru sekolah menengah di Constantine, Algeria pada tahun 1950. Tahun 1959 ia menerima tawaran untuk mengajar di University of Paris, Sorbonne. Selain mengajar di Sorbonne, Lyotard juga aktif sebagai anggota kelompok kiri militan Perancis, *Socialisme ou barbarie* yang sangat terkenal pada saat itu. Tahun 1966 Lyotard meninggalkan Sorbonne untuk mengajar di University of Nanterre.

Tahun 1970, Lyotard meninggalkan Nanterre untuk mengajar di University of Paris VIII-Vincennes. Tahun 1971, ia menyelesaikan studi doktoralnya dan mempublikasikan buku *Discourse, Figure*, sebuah karya filsafat pertamanya. Dua tahun kemudian ia menerbitkan buku *Dérive à partir de Marx et Freud* (1973) dan *Libidinal Economy* (1974). Tahun 1979, Lyotard mempublikasikan Just Gaming dan karya monumentalnya yang kini telah menjadi klasik *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*. Karya Lyotard ini awalnya adalah sebuah laporan hasil penelitian mengenai perubahan masyarakat yang dipesan oleh *Conseil des universités du Québec*, Kanada. Dalam penelitian ini Lyotard meneliti kondisi pengetahuan, ilmu dan teknologi dalam masyarakat kapitalisme lanjut. Ia menyimpulkan bahwa telah terjadi perubahan realitas masyarakat

Quebec yang ditandai dengan penolakan terhadap apa yang ia sebut sebagai narasi besar (*Grand Narratives*). Dalam bukunya inilah untuk yang pertama kali istilah “postmodernisme” digunakan dalam diskursus filsafat dan ilmu sosial.

Lyotard meninggal pada tahun 1998 di Paris. Ketika meninggal, ia adalah Professor Emeritus di University of Paris VIII, serta Professor di Emory University, Atlanta, Amerika Serikat.

Jean Francois Lyotard adalah pemikir filsafat dan sosial Perancis yang mulai meletakkan dasar argumentasi filosofis dalam diskursus postmodernisme. Melalui bukunya yang telah menjadi klasik, *The Condition of Postmodern: A Report on Knowledge* (1984), Lyotard mencatat beberapa ciri utama kebudayaan postmodern. Menurutnya, kebudayaan postmodern ditandai oleh beberapa prinsip yakni: lahirnya masyarakat komputerisasi, runtuhnya narasi-narasi besar modernisme, lahirnya prinsip delegitimasi, disensus, serta paralogi.

Masyarakat komputerisasi adalah sebutan yang diberikan Lyotard untuk menunjuk gejala *post-industrial* masyarakat Barat menuju *the information technology era*. Realitas sosial budaya masyarakat dewasa ini seperti yang ditelitinya secara seksama di Quebec Kanada adalah masyarakat yang hidup dengan ditopang oleh sarana teknologi informasi, terutama komputer. Dengan komputerisasi, prinsip-prinsip produksi, konsumsi dan transformasi mengalami revolusi radikal. Penggunaan tenaga manusia yang semakin terbatas dalam sektor ekonomi, pelipatan ruang dalam dunia telekomunikasi, percepatan pengolahan data dan informasi yang mampu mengubah bahkan memanipulasi realitas, penyebaran pengetahuan dan kekuasaan secara massif, adalah beberapa konsekuensi perkembangan teknologi (Sarup, 1989).

Dalam masyarakat komputerisasi seperti ini, nilai-nilai serta asumsi dasar modernisme: rasio, hukum sejarah linear, subjek, ego, narasi besar, otonomi, identitas tidak lagi mampu menggambarkan



realitas. Bahkan, realitas telah berubah sesuai dengan perubahan karakter masyarakat post-modernisme. Realitas masyarakat seperti inilah yang menjadi wadah, arena perjuangan, nilai-nilai baru postmodernisme.

Menggarisbawahi sifat transformatif masyarakat komputerisasi yang lebih terbuka, majemuk, plural dan demokratis, Lyotard selanjutnya menyatakan bahwa kebenaran yang dibawa oleh narasi-narasi besar (*Grand Narratives*) modernisme sebagai metanarasi kini telah kehilangan legitimasinya. Hal ini karena dalam masyarakat kontemporer, sumber pengetahuan dan kebenaran pengetahuan tidak lagi tunggal. Realitas kontemporer tidak lagi homolog (*homo*: satu, dan *logi*: tertib nalar), melainkan paralog (*para*: beragam, dan *logi*: tertib nalar) (Awuy, 1995). Pengetahuan dan kebenaran kini menyebar dan plural.

Konsekuensinya, prinsip legitimasi modernisme harus dibongkar dengan prinsip *delegitimasi*. Dengan delegitimasi, berarti diakui adanya berbagai unsur realitas yang memiliki logikanya sendiri. Dengan delegitimasi, menurut Lyotard, prinsip lain yakni disensus menjadi lebih bisa diterima ketimbang prinsip konsensus seperti ditawarkan Juergen Habermas. Disensus adalah prinsip yang mengakui perbedaan dan keunikan setiap unsur dalam realitas, yang memiliki logika dan hak hidupnya sendiri.

2. Michel Foucault: Kuasa-Pengetahuan Era Postmodern

Michel Foucault adalah filsuf, sejarawan dan sosiolog kontemporer Perancis. Ia dilahirkan di Poitiers, Perancis pada tanggal 15 Oktober 1926 dengan nama Paul-Michel Foucault, dari sebuah keluarga kaya. Ayahnya, Paul Foucault, adalah seorang dokter bedah terkenal di Perancis pada saat itu. Pendidikan dasarnya diselesaikan di sekolah Katolik, *Jesuit Collège Saint-Stanislas* dan dilanjutkan ke *École Normale Supérieure*

(*rue d'Ulm*), sekolah prestisius yang dianggap sebagai pintu masuk karir akademik terbaik di bidang humaniora di Perancis. Foucault sangat dikenal karena karya-karya kritisnya mengenai institusi sosial peripheral (pinggiran), penjara, rumah sakit jiwa, kegilaan, ilmu ilmu kemanusiaan, dan sejarah seksualitas. Pemikiran Foucault tentang kekuasaan, hubungan kuasa, pengetahuan dan diskursus serta arkeologi pengetahuan banyak diperbincangkan dalam kajian post-strukturalisme. Beberapa karya penting Michel Foucault yang hingga saat ini masih menjadi bahan diskusi di kalangan pemikir ilmu-ilmu sosial diantaranya adalah *Madness and Insanity: History of Madness in the Classical Age* (1961), *The Birth of the Clinic: An Archaeology of Medical Perception* (1963), *The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences* (1966), *The Archaeology of Knowledge* (1969), *Discipline and Punish: The Birth of the Prison* (1975) dan *The History of Sexuality: An Introduction* (1976). Dalam kajian postmodernisme, nama Foucault disejajarkan dengan pemikir-pemikir postmodern seperti J.F. Lyotard, J. Baudrillard, J. Derrida dan F. Jameson.

Foucault memulai karir akademik pada tahun 1951 dengan mengajar di *École Normale*. Dari tahun 1953-1954 ia mengajar psikologi di *Université Lille Nord de France*. Tahun 1954 Foucault menjadi duta budaya Perancis dan mengajar di *University of Uppsala*, Swedia. Tahun 1958 Foucault meninggalkan *Uppsala* dan mengajar di *Warsaw University* serta *University of Hamburg*, Jerman. Tahun 1960 Foucault kembali ke Perancis dan mengajar Filsafat di *University of Clermont-Ferrand*. Terakhir Foucault mengajar *Sejarah Sistem Pemikiran* dan menjadi *Rektor Collège de France*.

Foucault mencatat beberapa karakter khas kebudayaan postmodern. Berangkat dari Kant, Foucault bersepakat bahwa Era Pencerahan adalah saat dimana rasio mendapatkan tempat



istimewa dalam sejarah perkembangan kebudayaan. Namun ia menolak anggapan Kant bahwa rasio berlaku universal. Baginya rasio hanyalah salah satu cara untuk menanggapi situasi zaman saat itu. Menurutnya terdapat tanggapan lain terhadap Pencerahan seperti diwakili Baudelaire yaitu ironi. Ironi adalah keberanian, yang disertai kegetiran, untuk terlibat secara aktif dengan situasi kini dan disini, historis dan lokal (*locally determined*), tanpa harus mencantolkan diri pada status-status khusus dari kebenaran kebenaran absolut, di luar diri manusia, baik atas nama Tuhan, logos, atau yang lainnya.

Ironi juga berarti menjalani kehidupan tanpa dibebani oleh prinsip baku, yang sudah terpatok sebelumnya (Sahal, 1994). Dengan ironi, Foucault menerima keyakinan bahwa sejarah modernitas bukanlah sejarah tunggal, dengan narasi besar yang monolog: rasionalitas. Lebih jauh ia menyingkapkan bahwa narasi-narasi besar modernisme hanyalah mistifikasi yang bersifat ideologis dan semu. Ia misalnya, menolak pandangan para filsuf Pencerahan yang mengatakan bahwa manusia adalah subjek otonom, mandiri dan mampu menentukan dirinya sendiri. Sebaliknya menurut Foucault, manusia modern sebagai subjek ataupun objek sebenarnya tidak lebih dari individu yang lahir dan diciptakan oleh multiplisitas kekuasaan melalui disiplin, normalisasi dan regulasi, pengakuan dan penguasaan diri (Sahal, 1994).

Dalam bukunya *The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences* (1966), Foucault membahas konsepsi sejarah dan memperkenalkan istilah genealogi sejarah, sebuah istilah yang dipengaruhi oleh gagasan genealogi Nietzsche. Menurut Foucault, genealogi sejarah adalah konsepsi sejarah yang secara sadar mendelegitimasi masa kini dan memisahkannya dari masa lalu. Tujuannya adalah untuk menghapuskan legitimasi masa kini sehingga dapat menemukan perbedaan khas masa lalu dan

masa kini. Ketika teknologi kekuasaan masa lalu diuraikan secara rinci, maka asumsi-asumsi masa kini yang memandang masa lalu sebagai "irasional" akan runtuh. Dengan menawarkan konsep genealogi sejarah, Foucault juga sekaligus menolak model sejarah teleologis Hegelian: yakni sejarah yang bergulir mengikuti alur linear maju yang berakhir pada satu tujuan tertentu. Lebih lanjut, menurut Foucault, genealogi berfokus pada pengetahuan lokal yang bersifat diskontinu, remeh-temeh dan yang kerap kali dianggap tidak sah dihadapan klaim teori-teori besar.

Dalam bukunya yang lain *Madness and Insanity: History of Madness in the Classical Age* (1961), Foucault meneliti sejarah kegilaan dan peradaban masyarakat Barat. Menurut Foucault, kegilaan sebenarnya memiliki sumbangan tersendiri terhadap peradaban Barat. Berdasarkan penelitian yang dilakukannya, menurut Foucault genealogi kegilaan sejak abad ke-17 M memperlihatkan telah terjadinya praktik pemenjaraan moral yang dilakukan melalui mekanisme disiplin dan penghukuman orang-orang gila. Penghukuman orang-orang gila, sejatinya bukan sekedar pemenjaraan fisik semata, namun lebih dari itu adalah sebuah praktik pemenjaraan moral.

Dalam sejarah peradaban Barat abad pertengahan, pada awalnya orang gila (yang dianggap sebagai masalah sosial) dibiarkan berkeliaran di jalan-jalan. Teknik penanganan orang gila dalam rentang sejarah berikutnya kemudian berubah dengan cara mengasingkan orang gila ke dalam "kapal-kapal orang gila." Dalam tradisi budaya masyarakat Eropa, terdapat ide bahwa "air laut, pelaut dan orang gila" adalah sebuah perpaduan yang sempurna. Karena itulah muncul praktik pengasingan "kapal orang gila." Ide "kapal orang gila" menjadi sangat populer pada abad ke-16 M sebagai tempat terbaik bagi orang-orang gila untuk hidup diluar lingkungan "normal" masyarakat Eropa. Karya seni dan sastra pada abad-abad inipun kerap diwarnai dengan



tema-tema kapal orang gila.

Abad ke-17 M selanjutnya ditandai dengan penggantian “kapal orang gila” dengan “rumah pengurungan (*correction house*)”. Orang gila dikurung di sebuah gedung yang dibuat khusus oleh pemerintah untuk mengurung mereka. Meskipun dianggap lebih manusiawi, namun dalam kenyataannya keberadaan rumah pengurungan banyak dikritik karena tidak mampu menyapkan keberadaan orang gila di Eropa. Pada abad ke-19 M, rumah pengurungan serempak menghilang karena dianggap tidak efektif menyapkan keberadaan orang gila di Eropa.

Selanjutnya lahirlah apa yang disebut sebagai “rumah sakit jiwa”, yang menurut Foucault hanya mengubah pengurungan fisik menjadi pengurungan jiwa. Dengan mengambil kasus rumah sakit jiwa Samuel Tuke di Inggris, Foucault menyatakan bahwa rumah sakit jiwa adalah instrumen penyeragaman moral dan pengendalian diri melalui proses internalisasi, ketertiban, kepatuhan, disiplin dan hukuman. Dengan kata lain, kegilaan telah menjadi model instrumen hukum kesadaran/pembentukan subjektivitas modern dimana kekerasan eksternal digantikan oleh internalisasi diri dan kontrol sosial serta psikologis. Itulah sumbangan terbesar fenomena kegilaan terhadap sejarah peradaban Barat.

Melalui bukunya *Discipline and Punish: The Birth of the Prison* (1975) Foucault meneliti struktur kekuasaan disipliner yang berkembang dalam sejarah masyarakat Barat. Pada abad ke-18 M, menurut Foucault telah terjadi perubahan mode pelaksanaan kekuasaan dari mode kekuasaan monarkis ke kekuasaan disipliner. Dalam masyarakat feodal, kekuasaan pengadilan tidak banyak menahan pelaku kejahatan, namun hukuman diberikan secara spektakuler sehingga orang lain takut untuk melakukan kejahatan yang sama. Inilah mode kekuasaan monarkis. Sementara itu, muncul mode kekuasaan baru, yaitu kekuasaan disipliner

dimana ditanamkan sistem pengawasan yang diinternalisasikan hingga setiap orang menjadi pengawas bagi dirinya sendiri (mirip konsep Panopticon dari Jeremy Bentham).

Dalam bukunya *The History of Sexuality: An Introduction* (1976) Foucault mencoba melacak sejarah perkembangan seksualitas dan kekuasaan. Menurut Foucault, sejarah seksualitas pada dasarnya adalah sejarah pembentukan wacana seksualitas melalui kekuasaan (pikiran). Pada abad ke-18 M, seksualitas di dunia Barat awalnya hanya dipahami dalam pengertian badaniah (*body*). Praktik pengakuan Kristen selanjutnya secara perlahan mengubah pemahaman seksualitas, tidak hanya sebagai wacana tubuh, melainkan juga pikiran. Foucault menolak tesis “penindasan seksualitas” Williem Reich yang menyatakan bahwa seiring perkembangan kapitalisme, seksualitas manusia yang alamiah semakin dibatasi dan ditindas. Asketisme, disiplin kerja dan figur ayah borjuis kapitalis yang otoriter dianggap berperan dalam proses penindasan seksualitas Barat. Namun menurut Foucault, sebenarnya pada era yang sama wacana seksualitas justru mendapatkan tempat positif, yakni di dunia medis, psikiatri dan pendidikan. Melalui domain-domain inilah wacana seksualitas berubah tidak hanya melulu soal tubuh, namun soal pikiran dan norma-norma yang direproduksi dan dilegitimasi oleh ilmu-ilmu dan praktik kuasa era modern. Dengan kata lain, seksualitas adalah produk kuasa dan sistem wacana peradaban Barat.

Akhirnya, dalam bukunya *The Archaeology of Knowledge* (1969) Foucault menguraikan hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan. Foucault menolak pemahaman tentang kekuasaan yang bersifat negatif, membatasi, menghalangi, melarang. Kekuasaan juga bukan hak milik atau kemampuan. Pola hubungan kekuasaan tidak berasal dari negara atau penguasa (terpusat). Sebaliknya, kekuasaan bersifat positif, menyebar luas kemana-mana.



Kekuasaan menciptakan realitas dan wacana pengetahuan serta kebenaran yang baru. Kekuasaan melahirkan pengetahuan baru. Sebaliknya, pengetahuan adalah kekuasaan untuk mendefinisikan yang lain. Pengetahuan menciptakan pengaruh-pengaruh kekuasaan. Tanpa pengetahuan, tidak ada kuasa. Inilah: kuasa-pengetahuan (*pouvoir-savoir*).

Kekuasaan dalam pandangan Foucault ini berbeda sama sekali dengan yang dipahami oleh kaum Weberian dan Marxian. Bagi kaum Weberian, kekuasaan adalah kemampuan subjektif untuk mempengaruhi orang lain. Sementara bagi kaum Marxian, kekuasaan adalah artefak material yang bisa dikuasai dan digunakan untuk mendominasi dan menekan kelas lain. Menurut Foucault, kekuasaan bukanlah kekuatan, institusi atau struktur yang bersifat menundukkan. Kekuasaan adalah label nominal bagi relasi strategis yang kompleks dalam masyarakat. Ia menyebar dan hadir di mana-mana, dimiliki oleh siapa saja. Untuk itu, ketimbang berusaha mengimami gagasan besar yang cenderung manipulatif, Foucault lebih memilih untuk menyibuki persoalan-persoalan kecil dan lokal yang seringkali tak jamak dibicarakan. Tema-tema seperti rumah sakit, penjara, barak-barak tentara, sekolah, pabrik, pasien, seks, orang gila dan para kriminal menjadi titik perhatian utama selama karir kefilosofannya.

Dengan upaya besar dan cerdasnya ini, Foucault telah memberikan dua sumbangan besar terhadap postmodernisme. **Pertama**, keberhasilannya menyingkap mitos-mitos modernisme yang menampilkan dirinya sebagai kebenaran absolut, yang universal, namun sebenarnya palsu. **Kedua**, pemihakannya terhadap persoalan-persoalan yang selama ini ditindas oleh rasionalitas modern, tersisih, marjinal dan dikucilkan agar lebih didengar dan diperhatikan.

3. Jacques Derrida: Dekonstruksi Modernitas

Jacques Derrida adalah seorang filsuf dan

pemikir sosial berkebangsaan Perancis yang lahir pada tanggal 15 Juli 1930, di El Biar, Algeria. Dididik dalam tradisi pendidikan Perancis, tahun 1949 ia belajar di *École Normale Supérieure* (ENS), sebuah sekolah elit di Paris dan kemudian mengajar filsafat di Universitas Sorbonne (1960 hingga 1964), *École Normale Supérieure* (1964 hingga 1984), dan di *École des Hautes Études en Sciences Sociales* (1984 hingga 1999). Sejak tahun 1960-an ia mulai mempublikasikan buku dan karya ilmiah di jurnal-jurnal ternama. Ia juga banyak memberikan kuliah di universitas terkenal di Amerika Serikat, termasuk di Yale University dan University of California. Derrida meninggal pada tanggal 8 Oktober 2004 di Paris Perancis.

Derrida mencoba menyingkap sifat paradoks modernisme dengan karya-karyanya. Melalui Derrida terbongkar karakter kekerasan dan teror yang disebar oleh modernisme semenjak dirayakannya prinsip logosentrisme. Dalam logosentrisme, salah satu ciri yang menonjol adalah cara berpikir oposisi biner yang bersifat hierarkis (esensi - eksistensi, substansi - aksidensi, jiwa - badan, makna - bentuk, transenden - imanen, positif - negatif, lisan - tulisan, konsep - metafor) dengan anggapan bahwa yang pertama adalah pusat, sedang yang kedua adalah derivasi, pinggiran. Cara berpikir ini mendorong sejarah filsafat Barat cenderung bersifat totaliter karena menganggap bahwa yang bukan pusat, yang pinggiran, yang lain, the others, harus disubordinasikan ke dalamnya.

Derrida terutama dikenal sebagai pendukung utama dekonstruksi, sebuah istilah yang merujuk pada strategi kritis yang menggugat konsep perbedaan atau oposisi biner, yang melekat dalam sejarah pemikiran Barat. Oposisi biner senantiasa mengandaikan adanya hirarki dimana istilah yang satu selalu lebih penting atau utama ketimbang yang lain. Contoh oposisi biner alam dan budaya, ucapan dan tulisan, pikiran dan



tubuh, kehadiran dan ketidakhadiran, di dalam dan di luar, makna literal dan metaforis, bentuk dan makna, dan lain sebagainya. Untuk “mendekonstruksi” oposisi biner, Derrida melakukan pelacakan ketegangan dan kontradiksi antara kedua istilah, terutama yang bersifat implisit. Analisis dekonstruksi menunjukkan bahwa oposisi biner tidak bersifat alamiah namun merupakan produk atau “konstruksi” sosial dan budaya.

Istilah “dekonstruksi” awalnya berasal dari Martin Heidegger, yang menyuarakan dilakukannya destruksi atau dekonstruksi sejarah ontologi Barat. Dalam penggunaannya kemudian, “dekonstruksi” menjadi sebuah metode penting yang banyak digunakan oleh para filsuf dan pemikir sosial. Dekonstruksi, menurut Derrida adalah juga strategi untuk memeriksa sejauh mana struktur-struktur yang terbentuk hendak dimapankan batas-batasnya dan ditunggalakan pengertiannya, yakni melalui pembalikan hierarki oposisi biner secara terus-menerus (Sahal, 1994). Dengan dekonstruksi hendak dimunculkan kembali dimensi-dimensi metaforis dan figuratif dari bahasa yang menjadi pembentuk realitas. Implikasinya adalah mulai melumernya batas-batas antara konsep dan metafor, antara kebenaran dan fiksi, antara filsafat dan puisi, dan antara keseriusan dan permainan. Dengan dekonstruksi pula, cerita-cerita besar modernitas dipertanyakan, dirongrong dan disingkap sifat paradoksnya. Lebih jauh dekonstruksi hendak memunculkan dimensi-dimensi yang tertindas di bawah totalitas modernisme.

Melalui dekonstruksi, Derrida mencoba meletakkan kembali kedudukan struktur dalam keadaan asalnya, yakni keadaan dimana relasi antara pusat dan pinggiran belum lagi mengeras. Dengannya diinginkan pluralitas dan heterogenitas kehidupan yang membeku dan tertindas selama masa modernisme kembali terhampar. Dengan dekonstruksi, wacana-wacana yang sebelumnya tertindas: kelompok etnis, kaum feminis, dunia ketiga,

ras kulit hitam, kelompok *gay*, *hippies*, *punk*, atau gerakan peduli lingkungan kini mulai diperhatikan. Dengan dekonstruksi, sejarah modernisme hendak ditampilkan tanpa kedok, apa adanya.

Oposisi biner antara ucapan dan tulisan misalnya, diterima sebagai konstruksi bahwa ucapan lebih penting ketimbang tulisan. Kebenaran ini mengasumsikan bahwa melalui ucapan ide dan maksud pembicara bisa secara langsung “hadir”, sementara melalui tulisan ide dan maksud pembicara relatif berjarak atau malah “tidak hadir” dan karena cenderung disalahpahami. Dengan dekonstruksi Derrida tidak sekedar ingin mengubah oposisi ucapan dan tulisan – bahwa tulisan lebih penting ketimbang ucapan – namun lebih dari itu ia ingin menyusun ulang atau “meruntuhkan” oposisi biner sehingga tidak ada yang lebih penting diantara ucapan dan tulisan.

Pada tahun 1960-an karya-karya Derrida mulai diterima di Perancis dan di luar Perancis sebagai gerakan interdisipliner yang dikenal dengan nama strukturalisme. Strukturalisme menganalisis berbagai fenomena kebudayaan seperti mitos, ritual agama, cerita sastra, fashion dan lain-lain, sebagai sebuah sistem tanda yang hampir sama dengan bahasa dengan aturan dan strukturnya yang khas. Beberapa karya Derrida juga dianggap sebagai kritik terhadap pemikiran tokoh-tokoh strukturalisme awal seperti Saussure, Claude Lévi-Strauss, dan Michel Foucault sehingga beberapa kalangan menyebutnya sebagai penyokong “poststrukturalisme”. Lebih dari semua itu, terutama karena keberhasilannya membongkar sifat paradoks cerita-cerita besar modernitas melalui metode dekonstruksi, Derrida banyak digolongkan sebagai salah satu pemikir utama teori sosial postmodern.

4. Jean Baudrillard: Dunia Simulasi dan Hiperrealitas Postmodern

Jean Baudrillard dilahirkan di kota Riems, Perancis Barat, pada 5 Januari 1929.



Bersama saudara-saudaranya yang lain Baudrillard hidup dalam tradisi keluarga petani urban yang sederhana. Ia adalah orang pertama dalam keluarganya yang bekerja sebagai ilmuwan secara serius. Pada tahun 1966 Baudrillard menyelesaikan tesis sosiologinya di Universitas Nanterre di bawah bimbingan Henry Lefebvre, seorang anti-strukturalis Perancis kondang saat itu. Setahun setelah lulus, ia kemudian masuk ke Universitas Nanterre, untuk mengajar disana. Setelah setahun mengajar di Universitas Nanterre, selanjutnya Baudrillard bergabung dengan Roland Barthes mengajar di Ecole des Hautes Etudes.

Melalui bukunya *For a Critique of The Political Economy of The Sign* (1981), Baudrillard menyatakan bahwa dalam masyarakat postmodern, nilai tanda (*sign-value*) dan nilai-simbol (*symbolic-value*) telah menggantikan nilai-guna (*use-value*) dan nilai-tukar (*exchange-value*). Dengan mengambil alih pemikiran Marx mengenai nilai-guna dan nilai-tukar, pemikiran Barthes mengenai semiologi, pemikiran Marcel Mauss mengenai *gift* atau pemberian, dan pemikiran Georges Bataille mengenai *expenditure* atau belanjaan (Lechte, 1994) Baudrillard menolak prinsip nilai-guna dan nilai-tukar Marx dan menyatakan bahwa aktivitas konsumsi manusia pada dasarnya merupakan aktivitas non-utilitarian. Ia mengatakan bahwa dalam institusi semacam Kula dan Potlach dalam masyarakat primitif, kebiasaan memberi sesuatu dan membelanjakan sesuatu ternyata didasarkan pada prestise dan kebanggaan simbolik, bukan pada kegunaan.

Menurut Baudrillard, perkembangan kapitalisme lanjut semenjak tahun 1920-an menunjukkan perubahan dramatis karakter produksi dan konsumsi dalam masyarakat konsumen. Bila dalam era kapitalisme awal, produksi menjadi faktor dominan yang membentuk pasar kapitalisme kompetitif, maka dalam era kapitalis lanjut, konsumsi adalah determinan pasar monopolis. Dalam era ini,

segala upaya ditujukan pada penciptaan dan peningkatan kapasitas konsumsi melalui pemassalan produk, diferensiasi produk dan manajemen pemasaran. Iklan, teknologi kemasan, pameran, media massa dan shopping mall merupakan ujung tombak strategi baru era konsumsi. Dalam masyarakat konsumen, objek-objek konsumsi yang berupa komoditi tidak lagi sekedar memiliki manfaat (nilai-guna) dan harga (nilai-tukar) seperti dijelaskan Marx. Namun lebih dari itu ia kini menandakan status, prestise dan kehormatan (nilai-tanda dan nilai-simbol). Objek komoditi dibeli karena makna simbolik yang ada di dalamnya, dan bukan karena harga atau manfaatnya (Lechte, 1994). Sebuah mobil Porsche atau BMW misalnya, dinilai bukan karena manfaatnya sebagai alat transportasi atau harganya yang mahal, melainkan karena ia menjadi simbol gaya hidup, prestise, kemewahan dan status sosial pemiliknya. Melalui objek-objek atau komoditi-komoditi itulah seseorang dalam masyarakat konsumen menemukan makna dan eksistensi dirinya.

Sejalan dengan pemikirannya tentang perubahan prinsip dari nilai-guna dan nilai-tukar ke nilai-tanda dan nilai-simbol, Baudrillard kemudian mengubah pula periodisasi sejarah masyarakat yang dibuat Marx. Menurut Marx, terdapat tiga tahap struktur masyarakat, yakni masyarakat feodal, masyarakat kapitalis dan masyarakat komunis. Baudrillard mengajukan periodisasi perubahan struktur masyarakat, yakni dari masyarakat primitif, masyarakat hierarkis dan masyarakat massa (Lechte, 1994). Menurut Baudrillard, masyarakat primitif ditandai dengan tidak adanya elemen tanda dalam interaksi seluruh aspek kehidupan masyarakatnya. Objek dipahami secara murni dan alamiah berdasarkan kegunaannya.

Selanjutnya dalam masyarakat hierarkis, lahir elemen tanda yang beroperasi masih dalam lingkup yang terbatas. Tanda dipahami sebagai makna yang ditanamkan oleh segolongan kelas kepada



kelas yang lain. Tanda juga mulai menggantikan kedudukan objek murni, yang kini memiliki nilai-tukar. Akhirnya, pada tahapnya yang tertinggi, terbentuklah masyarakat massa. Dalam masyarakat massa, tanda mendominasi seluruh aspek kehidupan. Tidak ada lagi objek murni, kecuali objek tanda. Individu dalam masyarakat massa berperan sebagai konsumen tanda tanpa memiliki status kelas tertentu.

Tahun 1983, melalui karya magnum opus-nya, *Simulations* (1983), Baudrillard memperkenalkan sebuah karakter khas kebudayaan masyarakat Barat dewasa ini. Dengan mengambil alih dan mengembangkan gagasan para pendahulunya: semiologi Saussure, *fetishism commodity* Marx, teori *differance* Derrida, *mythologies* Barthes, serta *genealogy* Foucault, Baudrillard menyatakan bahwa kebudayaan Barat dewasa ini adalah sebuah representasi dunia simulasi. Jika era pra-modern ditandai dengan logika pertukaran simbolik (*symbolic exchange*), era modern ditandai dengan logika produksi, maka era postmodern ditandai dengan logika simulasi. Dalam masyarakat simulasi, segala sesuatu ditentukan oleh relasi tanda, citra dan kode. Tanda adalah segala sesuatu yang mengandung makna, yang mengikuti teori semiologi Saussurean memiliki dua unsur, yakni penanda (bentuk) dan petanda (makna). Citra adalah segala sesuatu yang nampak oleh indera, namun sebenarnya tidak memiliki eksistensi substansial. Sementara kode adalah cara pengkombinasian tanda yang disepakati secara sosial, untuk memungkinkan satu pesan dapat disampaikan dari seseorang kepada orang yang lain (Piliang, 1998).

Dalam dunia simulasi, identitas seseorang misalnya, tidak lagi ditentukan oleh dan dari dalam dirinya sendiri. Identitas kini lebih ditentukan oleh konstruksi tanda, citra dan kode yang membentuk cermin bagaimana seorang individu memahami diri mereka dan hubungannya dengan orang lain. Lebih lanjut, realitas-realitas ekonomi, politik, sosial dan budaya, kesemuanya diatur

oleh logika simulasi ini, dimana kode dan model-model menentukan bagaimana seseorang harus bertindak dan memahami lingkungannya.

Ruang realitas kebudayaan dewasa ini, menurut Baudrillard merupakan cerminan apa yang disebutnya sebagai *simulacra* atau *simulacrum*. Simulacra adalah ruang realitas yang disarati oleh proses reduplikasi dan daur-ulang berbagai fragmen kehidupan yang berbeda (dalam wujud komoditas citra, fakta, tanda, serta kode yang silang-sengkarut), dalam satu dimensi ruang dan waktu yang sama (Piliang, 1998). Simulacra tidak memiliki acuan, ia adalah duplikasi dari duplikasi, sehingga perbedaan antara duplikasi dan yang asli menjadi kabur. Dalam ruang ini tidak dapat lagi dikenali mana yang asli dan mana yang palsu, mana hasil produksi dan mana hasil reproduksi, mana objek dan mana subjek, atau mana penanda dan mana petanda. Ruang simulacra ini memungkinkan seseorang menjelajahi berbagai fragmen realitas, baik nyata maupun semu; mereproduksi, merekayasa dan mensimulasi segala sesuatu sampai batasannya yang terjauh.

Dunia simulacra, yang menjadi wacana dominan kesadaran masyarakat Barat dewasa ini, papar Baudrillard, sebenarnya telah ada semenjak era Renaisans. Realitas simulacra memiliki tiga tingkatan periode historis, semenjak era Renaisans hingga sekarang, yakni simulacra Orde Pertama, simulacra Orde Kedua dan simulacra Orde Ketiga.

Simulacra Orde Pertama, berlangsung semenjak era Renaisans-Feodal hingga permulaan Revolusi Industri. Dalam orde ini, realitas dunia dipahami berdasarkan prinsip hukum alam, dengan ciri ketertiban, keselarasan, hierarki alamiah serta bersifat transenden. Alam menjadi pendukung utama sekaligus determinan kebudayaan. Tanda-tanda yang diproduksi dalam orde ini adalah tanda-tanda yang mengutamakan integrasi antara fakta dan citra secara serasi dan seimbang. Hal ini berkaitan erat dengan kehendak manusia zaman itu untuk



mempertahankan struktur dunia yang alamiah. Dengan demikian, prinsip dominan yang menjadi ciri simulacra Orde Pertama adalah prinsip representasi. Bahasa, objek dan tanda adalah tiruan dari realitas alamiah yang dibentuk secara linear dan tunggal. Sebagai tiruan, bahasa, objek dan tanda masih memiliki jarak dengan objek aslinya (Kellner, 1994).

Simulacra Orde Kedua, berlangsung bersamaan dengan semakin gemuruhnya era industrialisasi yang merupakan konsekuensi logis Revolusi Industri. Revolusi Industri, di satu sisi telah memberikan sumbangan besar bagi perkembangan kebudayaan. Namun disisi lain, Revolusi Industri juga telah menimbulkan eksese-eksese negatif bagi kebudayaan. Logika produksi, yang menjadi prinsip simulacra Orde Kedua, telah mendorong perkembangan teknologi mekanik sampai pada batasannya yang terjauh. Baudrillard menyatakan bahwa dengan teknologi reproduksi mekanik sebagai media dan prinsip produksi objek-objek alamiah telah kehilangan aura dan sifat transendensinya. Objek kini bukan lagi tiruan yang berjarak dari objek asli, melainkan sepenuhnya sama persis seperti yang asli. Dengan kemajuan teknologi reproduksi mekanik inilah, prinsip komoditi dan produksi massa menjadi ciri dominan era simulacra Orde Kedua.

Simulacra Orde Ketiga, lahir sebagai konsekuensi logis perkembangan ilmu dan teknologi informasi, komunikasi global, media massa, konsumerisme dan kapitalisme pada era Pasca Perang Dunia II. Lebih dari masa-masa sebelumnya, pada orde ini relasi berbagai unsur dan struktur budaya mengalami perubahan mendasar. Tanda, citra, kode dan subjek budaya tidak lagi merujuk pada referensi dan realitas yang ada. Simulacra Orde Ketiga ini ditandai dengan hukum struktural. Tanda membentuk struktur dan memberi makna realitas. Inilah era yang disebut Baudrillard sebagai era simulasi.

Tahun 1989, terbit karya Baudrillard, *Simulacra and Simulacrum* (1989), yang merupakan kelanjutan

karya monumentalnya *Simulations* (1983), dalam edisi bahasa Inggris. Dalam karyanya tersebut, Baudrillard mengembangkan gagasannya tentang masyarakat hiperrealitas. Adalah Marshall McLuhan sebenarnya yang pertama-tama membuka pembicaraan mengenai gagasan hiperrealitas dalam kebudayaan masyarakat Barat dewasa ini. Melalui dua bukunya, *The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man* (1962) dan *Understanding Media: The Extensions of Man* (1964), McLuhan meramalkan bahwa peralihan teknologi dari era teknologi mekanik ke era teknologi elektronik akan membawa peralihan pula pada fungsi teknologi sebagai perpanjangan badan manusia dalam ruang, menuju perpanjangan system syaraf (Kellner, 1994). Baudrillard menarik garis tajam pemikiran McLuhan sampai batasannya yang terjauh. Ia mengangkat pandangan-pandangan McLuhan tentang perpanjangan badan manusia dan *global village* ke dalam konteks perkembangan mutakhir dunia Barat, yang dewasa ini telah menjelma menjadi desa besar yang disebut Baudrillard sebagai *hiperreal village*. Menurut Baudrillard, perkembangan ilmu dan teknologi dewasa ini dengan *micro processor, memory bank, remote control, telecard, laser disc* dan *internet*, tidak saja dapat memperpanjang badan atau pusat sistem syaraf manusia, namun bahkan lebih fantastis lagi, mampu mereproduksi realitas, masa lalu dan nostalgia; menciptakan realitas baru dengan citra-citra buatan; menyulap fantasi, ilusi bahkan halusinasi menjadi kenyataan.

Lebih jauh, realitas yang dihasilkan teknologi baru ini telah mengalahkan realitas yang sesungguhnya dan bahkan menjadi model acuan yang baru bagi masyarakat. Citra lebih meyakinkan ketimbang fakta dan mimpi lebih dipercaya ketimbang kenyataan sehari-hari. Inilah dunia hiperrealitas: realitas yang lebih nyata dari yang nyata, semu dan meledak-ledak. Dalam dunia hiperrealitas, objek-objek asli yang merupakan hasil produksi



bergumul menjadi satu dengan objek-objek hiperreal yang merupakan hasil reproduksi. Realitas-realitas hiper, seperti media massa, Disneyland, *shopping mall* dan televisi nampak lebih real daripada kenyataan yang sebenarnya, dimana model, citra-citra dan kode hiperrealitas bermetamorfosa sebagai pengontrol pikiran dan tindak-tanduk manusia (Kellner, 1994). Tokoh Rambo, boneka Barbie, Jurassic Park, atau Star Trek Voyager yang merupakan citra-citra buatan adalah realitas tanpa referensi, namun nampak lebih dekat dan nyata dibanding keberadaan tetangga kita sendiri.

Sementara melalui karyanya *The Ecstasy of Communication* (1987), Baudrillard menyatakan bahwa dengan transparansi makna dan informasi, masyarakat Barat dewasa ini telah melampaui ambang batas menuju keadaan *permanent ecstasy*: ekstasi sosial (massa), ekstasi tubuh (kegemukan), ekstasi seks (kecabulan), ekstasi kekerasan (teror), dan ekstasi informasi (simulasi).

5. Fredrich Jameson: Kapitalisme Lanjut dan Postmodernisme

Fredrich Jameson adalah pemikir sosial Marxian berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Cleveland, Ohio, Amerika Serikat. Setelah lulus dari Haverford College pada tahun 1954, ia pergi ke Eropa dan belajar di Aix-en-Provence, Munich serta Berlin, dimana ia mempelajari perkembangan terbaru dalam kajian filsafat, terutama strukturalisme. Ia kembali ke Amerika Serikat untuk menyelesaikan studi doktoral di Yale University. Setelah mendapatkan gelar doktor, Jameson sempat mengajar di Harvard University selama tahun 1960 hingga 1965.

Awalnya, minat besar Jameson terhadap karya-karya Sartre membuatnya tertarik untuk mempelajari teori sastra Marxian. Meskipun Karl Marx telah mendapat tempat semakin penting dalam kajian ilmu sosial di Amerika Serikat, sebagian juga karena pengaruh para pemikir

Eropa yang pindah ke Amerika setelah pecah Perang Dunia II seperti Theodor Adorno, karya-karya sastra beraliran Marxian masih jarang dikenal di dunia akademik Amerika hingga akhir tahun 1950-an dan awal tahun 1960-an.

Pergeseran minat Jameson menuju paham Marxisme juga didorong oleh hubungan politik pribadinya yang semakin meningkat dengan tokoh-tokoh gerakan Kiri Baru. Tema-tema penelitiannya kemudian terfokus pada tokoh-tokoh seperti Kenneth Burke, Gyorgy Lukács, Ernst Bloch, Theodor Adorno, Walter Benjamin, Herbert Marcuse, Louis Althusser, dan Sartre, yang melihat kritik kebudayaan sebagai ciri yang melekat kuat dalam teori Marxian. Dalam banyak hal, Jameson bersama dengan pemikir kritik kebudayaan Marxian lainnya yaitu Terry Eagleton, berusaha menjelaskan peran penting pandangan Marxisme terhadap trend filsafat dan sastra kontemporer. Setelah pindah ke University of California, San Diego pada tahun 1967, Jameson menerbitkan buku berjudul *Marxism and Form: Twentieth-Century Dialectical Theories of Literature* (1971) dan *The Prison-House of Language: A Critical Account of Structuralism and Russian Formalism* (1972).

Karya penting Fredrich Jameson mengenai pemikiran postmodernisme adalah bukunya yang berjudul *Postmodernisme or the Cultural Logic of the Late Capitalism*. Dalam buku ini Jameson menyatakan bahwa kapitalisme saat ini telah menjadi cara pandang dominan masyarakat kontemporer dewasa ini. Jameson menolak pandangan seperti ini. Dengan buku ini Jameson bermaksud mengkritik postmodernisme dan menolak pendapat sebagian besar pemikir postmodernisme, terutama Jean Francois Lyotard dan Jean Baudrillard.

Buku ini sendiri awalnya merupakan artikel yang diterbitkan dalam jurnal *New Left Review* pada tahun 1984, ketika Jameson menjabat sebagai profesor Sastra dan Sejarah Kesadaran University



of California, Santa Cruz, Amerika Serikat. Artikel kontroversial ini kemudian dikembangkan menjadi buku pada tahun 1991. Dalam buku ini Jameson terutama melihat pandangan "skeptis postmodern terhadap metanarasi" sebagai "sebentuk pengalaman" yang muncul di kalangan buruh terdidik yang ditanamkan oleh sistem produksi kapitalisme lanjut.

Dengan mengikuti analisis Adorno and Horkheimer mengenai industri budaya, Jameson mendiskusikan fenomena postmodernisme dan menyatakan bahwa era postmodernitas dicirikan oleh pastiche dan krisis sejarah. Jameson menyatakan bahwa parodi (yang mensyaratkan penilain moral atau perbandingan dengan norma-norma sosial) telah digantikan oleh pastiche (yakni kolase dan berbagai bentuk penyimpalan tanpa landasan normatif apapun). Selanjutnya Jameson juga menyatakan bahwa era postmodern mengalami krisis sejarah dengan mengatakan bahwa: "sepertinya tidak ada lagi hubungan organik antara sejarah Amerika yang kita pelajari di dalam buku-buku sekolah dengan pengalaman hidup kota-kota metropolitan dengan gedung-gedung tinggi dan perusahaan-perusahaan multinasional dan kehidupan sehari-hari kita."

Lebih jauh Jameson menyatakan bahwa terdapat 3 tahap perkembangan kapitalisme. *Pertama*, tahap kapitalisme pasar atau munculnya pasar nasional yang dipersatukan. *Kedua*, tahap imperialis yang ditandai dengan munculnya jaringan kapitalisme global. *Ketiga*, tahap kapitalisme lanjut yang ditandai dengan ekspansi luar biasa hingga ke kawasan yang hingga kini belum dieksplorasi secara maksimal.

Dalam bukunya yang telah menjadi klasik tersebut, Jameson juga memberikan ciri-ciri masyarakat postmodern yang cenderung negatif sebagai berikut: (1) postmodernisme ditandai oleh kedangkalan dan kekurangan kedalaman; (2) postmodernisme ditandai oleh kepura-puraan

atau kelesuan emosi; (3) postmodernisme ditandai oleh hilangnya makna sejarah; (4) terdapat sejenis teknologi baru seperti televisi dan komputer yang melekat amat erat dengan masyarakat postmodern.

Diantara pemikir-pemikir postmodern yang lain, Fredrich Jameson adalah salah satu pemikir yang secara terbuka bersikap negatif dan mengkritik pandangan teoritis pemikiran sosial postmodern yang berkembang di awal abad ke-20 M.

KESIMPULAN: KRITIK DAN MASA DEPAN TEORI-TEORI SOSIAL POSTMODERN

Lahirnya teori-teori sosial postmodern dengan berbagai aksentuasi dan kontroversinya telah memunculkan banyak tanggapan kritis dari para pemikir filsafat dan sosial kontemporer. Suara kritis terhadap teori-teori sosiologi postmodern salah satunya dikemukakan oleh Mark Poster, seorang sosiolog dan komentator karya-karya pemikir postmodern. Poster mencatat bahwa setidaknya terdapat lima kelemahan teori-teori sosiologi postmodern (Kellner, 1994). **Pertama**, para pemikir teori-teori sosial postmodern seringkali tidak mampu menjelaskan dengan gamblang pengertian istilah-istilah kunci yang ada dalam karya-karya mereka. Hal ini mengakibatkan kekaburan pemahaman akan gagasan-gagasan orisinal yang dikemukakan para pemikir postmodern.

Kedua, Poster memandang gaya menulis para pemikir teori-teori sosiologi postmodern, misalnya Baudrillard, aneh dan ganjil karena seringkali tidak dibarengi dengan argumentasi yang sistematis dan logis. Kelemahan ini, dengan sendirinya, menjadikan pemikiran-pemikiran sosiologi postmodern kehilangan dasar argumentasi yang rasional. **Ketiga**, para pemikir teori sosiologi postmodern, tanpa disadarinya, telah terjatuh ke dalam sikap mentotalisasikan ide-ide pemikirannya,



dan menolak untuk mengubah atau membatasi pemikirannya.

Keempat, para pemikir teori-teori sosiologi postmodern terkesan terlalu menafikan kenyataan bahwa terdapat keuntungan-keuntungan dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Televisi, media massa dan internet dalam tampilannya yang positif juga memberikan manfaat seperti misalnya mempercepat penyebaran informasi tentang pendidikan, HAM dan lingkungan, menyampaikan berita peristiwa-peristiwa aktual yang tengah terjadi dan lebih membuka pemahaman akan sifat pluralisme dan humanisme kebudayaan dewasa ini. **Kelima**, sikap fatalis dan nihilis yang secara sadar banyak dipilih para pemikir teori-teori sosial postmodern, menjadikan pemikiran-pemikiran mereka jauh dari nilai-nilai moral dan agama.

Sementara itu Pauline M. Rosenau (1992), seorang pengamat teori sosial kontemporer Amerika melihat terdapat setidaknya 7 kontradiksi dalam pemikiran teori-teori sosial postmodern:

1. Posisi anti-teori dari para pemikir teori-teori sosial postmodern sebenarnya justru merupakan sebuah pendirian teoritis.
2. Sementara tokoh-tokoh teori-teori sosial postmodern menekankan hal-hal yang bersifat irasional, akal pikiran tetap digunakan untuk memperluas pandangannya.
3. Sikap teori-teori sosial postmodern untuk berfokus pada hal-hal yang terpinggirkan dalam dirinya sendiri sebenarnya merupakan penekanan evaluatif atas hal-hal yang diserangnya.
4. Teori-teori sosial postmodern menekankan intertekstualitas namun seringkali memperlakukan teks secara tertutup.
5. Dengan menolak kriteria modernisme untuk menilai sebuah teori, para pemikir teori-teori sosial postmodern tidak dapat menyatakan bahwa tidak ada kriteria yang absah untuk digunakan sebagai sarana penilaian.
6. Teori-teori sosial postmodern mengkritik

inkonsestensi modernisme, namun menolak untuk mengikuti norma konsistensi itu sendiri.

7. Para pemikir teori-teori sosial postmodern berkontradiksi di dalam dirinya sendiri dengan menyampaikan klaim-klaim kebenaran dalam tulisan-tulisan mereka sendiri.

Kritik lain disampaikan oleh Terry Eagleton, seorang kritikus sastra Marxian, dalam bukunya *The Illusions of Postmodernism* (1996). Dalam buku ini Terry Eagleton memaparkan ambivalensi, sejarah, kesalahpahaman dan kontradiksi teori-teori sosial postmodern. Menurutnya, postmodernitas adalah sebuah gaya pemikiran yang selalu mencurigai ide tentang kebenaran, akal, identitas dan obyektivitas, ide kemajuan universal atau emansipasi, dan narasi besar. Menolak norma-norma Pencerahan ini, postmodernitas melihat dunia modern sebagai realitas yang kontingen, tidak perpijak, beragam, tidak stabil, serta kebudayaan yang penuh dengan sikap skeptis mengenai obyektivitas kebenaran, sejarah, dan norma serta koherensi identitas.

Sementara itu, Jurgen Habermas, seorang filsuf kontemporer Jerman, juga memberikan kritikan terhadap pandangan postmodernisme. Dalam bukunya *Modernity, an Incomplete Project* (1984), Habermas mengatakan bahwa proyek modernitas yang dimulai sejak abad ke-19 demi membangun ilmu yang obyektif, hukum dan moralitas universal, serta seni yang otonom belumlah selesai. Para pemikir postmodern, menurut Habermas, terlalu tidak sabar untuk menuntaskan proyek modernitas yang seharusnya bisa mereka selesaikan. Dalam perdebatannya dengan beberapa pemikir postmodern, terutama Baudrillard dan Lyotard, Habermas tetap berpendirian bahwa modernisme masih bisa dibenahi, yakni dengan prinsip konsensus dan komunikasi partisipatif. Bagi Habermas, masa depan modernitas masih panjang sementara masa depan



postmodernitas tidak bisa diprediksi.

Akhirnya, Christopher Norris, seorang pemikir sosial Amerika, dalam sebuah bukunya *What's Wrong with Postmodernism: Critical Theory and the Ends of Philosophy* (1990), menyatakan bahwa saat ini kita telah sampai pada suatu titik dimana teori akan berbalik arah melawan dirinya sendiri, menghasilkan sebetuk sikap epistemologis skeptis yang ekstrim yang menghancurkan segala sesuatu: filsafat, politik, kritik dan teori – pada suatu tingkatan dimana nilai-nilai konsensus menjadi sesuatu yang paling tidak menarik untuk dibicarakan: inilah sikap postmodernisme.

Beberapa kritik tajam terhadap teori-teori sosial postmodern di atas patut menjadi catatan untuk memahami masa depan teori-teori sosial postmodern secara lebih jernih dan koheren. Setidaknya, diperlukan sikap kritis, reflektif dan obyektif dalam memandang realitas sosial dan budaya kontemporer dewasa ini. Sikap ini diperlukan sebagai filter agar tidak berkembang sikap *a priori*, *fatalis* dan *nihilis* terhadap kebudayaan postmodern yang saat ini, bagaimanapun, sedang kita hidupi.

Akhirnya, diperlukan landasan nilai moral dan agama dalam menyikapi masa depan realitas sosial dan kebudayaan yang begitu cepat berubah dewasa ini. Tanpa landasan nilai moral dan agama, maka pembacaan dan penyikapan realitas sosial dan kebudayaan dewasa ini, hanya akan sampai kepada sikap nihilisme, fatalisme dan keputusasaan yang justru tidak menyelesaikan persoalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, Akbar, S., 1992, *Postmodernism and Islam*. New York: Routledge.
- Awuy, Tommy F. 1995. *Wacana Tragedi dan Dekonstruksi Kebudayaan*. Yogyakarta: Jentera Wacana Publika.
- Bertens, Hans. 1995. *The Idea of the Postmodern: A History*. London: Routledge.
- Eagleton, Terry. 1996. *The Illusions of Postmodernism*. London: Wiley.
- Featherstone, Mike. 1988. In Pursuit of the Postmodern: An Introduction, dalam *Theory, Culture and Society* Volume 5, London.
- Habermas, Jürgen. 1984. *Modernity, an Incomplete Project*. New York: Routledge.
- Harvey, David. 1989. *The Condition of Postmodernity*. Oxford: Blackwell.
- Heryanto, Ariel. 1994. Postmodernisme: Yang Mana? Tentang Kritik dan Kebingungan dalam Debat Postmodernisme di Indonesia, dalam *Jurnal Kebudayaan Kalam* Edisi 1, Jakarta.
- Kellner, Douglas. 1994. *Baudrillard Reader*. Cambridge: Blackwell.
- Lash, Scott. 1990, *Sociology of Postmodernism*. London: Routledge.
- Lechte, John. 1994. *Fifty Key Contemporary Thinkers: From Structuralism to Postmodernism*. London: Routledge.
- Norris, Christopher. 1990. *What's Wrong with Postmodernism: Critical Theory and the Ends of Philosophy*. New York: John Hopkins University Press.
- Piliang, Yasraf. 1998. *Sebuah Dunia Yang Dilipat: Realitas Kebudayaan Menjelang Milenium Ketiga dan Matinya Postmodernisme*. Bandung: Mizan.
- Rosenau, Pauline. 1992. *Postmodernism and Social Sciences: Insights, Inroads, and Intrusion*. Princeton: Princeton University Press.
- Sahal, Ahmad. 1994. Kemudian Dimanakah Emansipasi? Tentang Teori Kritis, Genealogi dan Dekonstruksi, dalam *Jurnal Kebudayaan Kalam* Edisi 1, Jakarta.
- Sarup, Madan. 1989. *An Introduction Guide to Post-Structuralism and Postmodernism*. Athens: The University of Georgia Press.



- Siswanto, Andy. 1994. Menyangkal Totalitas dan Fungsionalisme: Postmodernisme Dalam Arsitektur dan Desain Kota, dalam *Jurnal Kebudayaan Kalam* Edisi 1, Jakarta.
- Smart, Barry. 1990. Modernity, Postmodernity and The Present, dalam Turner, Bryan S., (ed), *Theories of Modernity and Postmodernity*. London: Sage.
- Stauth, Georg and Turner, Bryan. 1988. Nostalgia, Postmodernism and the Critique of Mass Culture, dalam *Theory, Culture and Society* Volume 5, London.
- Sugiharto, Bambang. 1996. *Postmodernisme: Tantangan Bagi Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Turner, Bryan. 1990. Periodization and Politic in the Postmodern, dalam Turner, Bryan S., (ed), *Theories of Modernity and Postmodernity*. London: Sage.